

**REKONSTRUKSI PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI TERKAIT PENGEMBALIAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

TESIS

Oleh:

KATRINA SIAGIAN

201920251027



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Rekonstruksi Pasal 18 Undang – Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terkait
Pengembalian Keuangan Negara Dalam
Tindak Pidana Korupsi

Nama Mahasiswa : Katrina Siagian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251027

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Ilmu Hukum

Bekasi, 25 Juli 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN : 0312117102

Pembimbing II

Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDN : 0323035802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Rekonstruksi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Nama Mahasiswa : Katrina Siagian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251027

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian : 18 Juli 2022

Bekasi, Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Prof.Dr.M.S.Tumanggor,S.H.,M.Si.,CTA
NIDN. 0304065402

Penguji I : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H.,M.H.
NIDN. 011904085

Penguji II : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN. 0319077606

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Lusla Sulastri, S.H.,M.H.
NIDN. 0127117401

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.M.,M.H
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

Tesis yang berjudul **Rekonstruksi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.**

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk meyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 25 Juli 2022

Hormat Saya,



KATRINA SIAGIAN
NPM : 201920251027

ABSTRAK

Katrina Siagian/201920251027, Rekonstruksi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*), sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lain tidak saling berlawanan. Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Rumusan masalah dalam tesis ini, mengenai konstruksi ideal pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi saat ini dan dapatkah pelaksanaan kedepannya agar pengambalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat tercipta kepastian hukum. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) dengan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang konstruksi ideal pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi saat ini belum dapat optimal sebagai pidana tambahan yang merupakan bagian dari tujuan pemidanaan terhadap pelaku korupsi, dalam hal perhitungan kerugian keuangan Negara yang memerlukan waktu dan sinergitas antara aparat penegak hukum dengan BPK dan BPKP untuk menghitung kerugian keuangan Negara dalam tahap pembuktian tindak pidana korupsi. Pelaksanaan kedepannya agar pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi memerlukan rekonstruksi terhadap pengaturan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai perhitungan kerugian keuangan negara dan kewenangan lembaga atau instansi yang menghitung kerugian keuangan negara agar tercipta kepastian hukum dalam menerapkan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Keuangan Negara, Korupsi

ABSTRACT

Katrina Siagian/201920251027, *Reconstruction of Article 18 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes Related to Returning State Financial Losses in Corruption Crimes.*

As a state of law, every administration of government affairs must be based on applicable law (wetmatigheid van bestuur), so it is hoped that the interests of one another do not conflict with each other. The current development of corruption eradication has focused on three main issues, namely prevention, eradication, and asset recovery. The formulation of the problem in this thesis, regarding the ideal construction of regulating the return of state financial losses due to corruption at this time and can be implemented in the future so that the return of state financial losses due to corruption can create legal certainty. This thesis uses a normative legal research method (library) with secondary data and analyzed qualitatively to obtain conclusions about the ideal construction of regulating state financial losses in corruption, currently not being optimal as an additional crime that is part of the purpose of punishing corrupt perpetrators. , in the case of calculating state financial losses that require time and synergy between law enforcement officers and BPK and BPKP to calculate state financial losses in the stage of proving corruption. Future implementation so that the return of state financial losses due to criminal acts of corruption requires reconstruction of the provisions in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes regarding the calculation of state financial losses and the authority of institutions or agencies that calculate financial losses the state in order to create legal certainty in applying additional penalties to perpetrators of corruption.

Keywords: *Reconstruction, State Finance, Corruption*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas limpahan berkah dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dalam Program Pasca Sarjana di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan, dorongan, bantuan serta pendapat-pendapat sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat khususnya kepada :

1. Rektor Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dekan Fakultas Hukum Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M, sekaligus pembimbing yang sabar dan bijaksana dalam memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu konsisten dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kaprodi Fakultas Hukum Ibu Dr. Lusi Sulastri, S.H., M.H., dan Bapak Sesprodi Dr. Sugeng, S.H., M.H., atas arahan dan bimbingan keseharian dalam perkuliahan.
4. Bapak Dr. Hotma Pardomuan Sibuea, S.H., M.H., atas bimbingan pengajaran dan didikan yang diberikan kepada penulis, gemblengan ilmu pengetahuan hukum, pengajaran moral serta motivasi yang sangat kuat diberikan kepada penulis disela-sela waktu kesibukan beliau sehingga menanamkan pengetahuan ilmu hukum yang melekat abadi dalam hati penulis. Serta mengubah pandangan, pola pikir dan karakter penulis terkhusus dalam menyikapi permasalahan dan isu-isu.

5. Para dosen dan staf Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang tanpa mengenal lelah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran yang berkualitas serta membimbing kami untuk dapat menyelesaikan dengan cepat dan terarah.
6. Kepada suami terkasih AKBP Marupa Sagala, S.Ik., S.H., M.H. dan kepada anak-anak tersayang Musa Kerry Oloan Sagala dan Marsella Mysiel Klarissa Sagala atas dukungan doa dan memberikan semangat dalam proses penulisan karya ilmiah ini.
7. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs Logan Siagian, M.H., dan Mami tersayang St. Herlina Panjaitan atas didikan serta nasehat yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Inang mertua Pitta Simanjuntak dan kepada 6 kakak ipar dan dua yang memberikan semangat dalam proses penulisan karya ilmiah ini.
9. Adik-adik terkasih Iwan, AKBP dr. Carles Siagian, SpOT(K), Rosalina Siagian, Spd serta keluarga yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari pada penyelesaian karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, penulis mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena penulis menyadari bahwa dalam hal apapun tidak ada yang sempurna sehingga saran dan kritik atas penulisan karya ilmiah ini sangat diharapkan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya ilmiah ini dapat berguna bagi penulis, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap karya ilmiah ini.

Jakarta, 25 Juli 2022



Katrina Siagian

DAFTAR ISI

COVER DEPAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	7
1.2.1. Identifikasi Masalah	7
1.2.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Manfaat Penelitian	9
1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	9
1.4.1. Kerangka Teori	9
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	13
1.4.3. Kerangka Pemikiran	17
1.5. Metode Penelitian	18
1.5.1. Metode Pendekatan.....	18
1.5.2. Bahan Hukum	19
1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
1.5.4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	20
1.5.5. Analisa Bahan Hukum	21
1.6. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2.1. Tindak Pidana Korupsi.....	23
---------------------------------	----

2.1.1. Tindak Pidana.....	23
2.1.2. Korupsi.....	25
2.1.3. Unsur-unsur Korupsi.....	31
2.2. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	33
2.2.1. Sanksi	33
2.2.2. Pengembalian.....	36
2.2.3. Kerugian.....	38
2.2.4. Aspek Keuangan Negara.....	38
2.3. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi.....	41
BAB III PENGATURAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI	
3.1. Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	44
3.2. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Pihak Kejaksaan .	54
BAB IV REKONSTRUKSI PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI	
4.1. Kendala-kendala Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	61
4.2. Upaya Rekonstruksi Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	74
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	85
5.2. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP